

PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Anim Wiyana¹, Sufiati², Eva Marin Sambo³, Yuyun Nurasratunnisa⁴

^{1,2,3,4}STIEM Bongaya Makassar

Email: anim.wiyana@stiem-bongaya.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Transparansi Laporan Keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner sebagai sumber data primer. Populasi dalam penelitian ini meliputi 49 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu memilih 12 OPD berbentuk dinas dan badan. Dari masing-masing OPD, diambil 5 responden dari bagian sub keuangan. Data dari kuesioner telah diuji validitas, reliabilitas, serta melalui uji asumsi klasik, uji multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. Selain itu, transparansi laporan keuangan juga berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. Hal ini menandakan bahwa peningkatan penerapan Akuntansi Sektor Publik dan transparansi laporan keuangan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.

Kata kunci: Akuntansi Sektor Publik, Transparansi, Akuntabilitas Kinerja.

ABSTRACT

This research aims to examine and analyze the Influence of Public Sector Accounting Implementation and Financial Report Transparency on the Performance Accountability of Government Agencies in Pangkajene and Kepulauan District. The data collection technique used primary data obtained from questionnaires. The population in this study consisted of 49 Local Government Organizations (OPD). The sampling technique employed a purposive sampling method, selecting 12 OPDs in the form of departments and agencies. From each OPD, 5 respondents from the sub-financial section were selected. The questionnaire data has been tested for validity, and reliability, as well as classical assumption tests, multicollinearity, and heteroscedasticity. The data analysis method used multiple regression. The test results indicate that the Implementation of Public Sector Accounting has a significant effect on the Performance Accountability of Government Agencies in Pangkajene and Kepulauan District. Additionally, Financial Report Transparency also has a significant effect on the Performance Accountability of Government Agencies in Pangkajene and Kepulauan District. This means that the increase in the Implementation of Public Sector Accounting and Financial Report Transparency can significantly enhance the Performance Accountability of Government Agencies in Pangkajene and Kepulauan District.

Keywords: Public sector accounting, transparency, performance accountability.

PENDAHULUAN

Lembaga Administrasi Negara, (Negara, 2013) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah di Lembaga Administrasi Negara. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan capaian pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara berkala. Dalam era modern masyarakat menuntut agar

penyelenggaraan pemerintah secara baik dan bersih. Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif. Penerapan SAKIP bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah media untuk melaporkan suatu keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas tuntutan pertanggung jawaban dalam laporan keuangan. Dengan itu akuntabilitas kinerja dapat tercapai apabila memenuhi suatu prinsip dalam ketepatan waktu dan juga sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Rahmawati, et al., 2022). Laporan keuangan akan menunjukkan kualitas informasi yang baik jika penerapan standar akuntansi pemerintah, pada tingkat pemerintah pusat, tingkat daerah, antar departemen dan lembaga negara dapat menggunakan akuntansi sektor publik sebagai patokan dalam menyelesaikan permasalahan public.

Akuntansi Sektor Publik mengikuti alur proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan (Bastian, 2019). Sedangkan Menurut (Salamah, et al., 2021) mengatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah Suatu proses pengindetifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) darisuatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Umar, et al., 2018). Dalam (Pemerintah, 2010) Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 disebutkan bahwa Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya.

Kabupaten Pangkep meraih predikat B hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tahun 2020. Predikat yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Pangkep ini, naik satu strip dibanding tahun sebelumnya yang hanya mendapat predikat CC atau cukup. Prestasi ini, merupakan buah dari kerja keras dan kebersamaan semua pihak untuk perbaikan birokrasi di Pangkep, yakni

dilansir dari (Sudirman, 2021). Meski Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan meningkat menurut staf bagian keuangan di BAPPEDA, penerapan akuntansi sektor publik masih lambat dimana saat penyusunan laporan keuangan yang dilakukan pemerintah kabupaten pangkep setiap tahunnya masih banyak dijumpai hambatan/kendala disebabkan besarnya aset yang dimiliki kabupaten pangkajene dan kepulauan yang mesti dijumlahkan kedalam laporan keuangan, sehingga tahap pelaksanaan dan penatausahaan keuangan tidak berjalan sesuai tata waktu yang ditetapkan. Sedangkan dalam hal transparansi laporan kinerja keuangan pemerintah daerah kurang efisien dan transparan dalam mengakses laporan keuangan tersebut kepada masyarakat. Secara umum laporan keuangan hanya di publikasikan dan di akses dalam lingkungan internal pemerintah saja, sedangkan masyarakat luas belum dapat secara leluasa mendapatkannya. Hal ini yang mendasari peneliti tertarik untuk mengetahui penerapan akuntansi sektor publik dan transparansi laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kabupaten pangkajene dan kepulauan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Surat Keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara LAN Nomor 9 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah di Lembaga Administrasi Negara. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefesiesikan hasil dari proses organisasi, yakni dengan melakukan Penetapan perencanaan strategik, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja dan Pemanfaatan informasi kinerja. Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu didasari dari dua hal yaitu penerapan akuntansi sektor publik yang merupakan alat informasi baik bagi pemerintah dan bagi publik untuk pengambilan keputusan, terutama untuk melakukan alokasi sumberdaya. Serta transparansi laporan keuangan yang memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.

Menurut (Mardiasmo, 2021 hal. 27) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut (aulia, 2021) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Menurut (Humairah, 2022) Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah adalah sebagai berikut: Akuntabilitas program, Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, Akuntabilitas proses, Akuntabilitas kebijakan

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 Tentang standar akuntansi pemerintah Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Penerapan akuntansi sektor publik adalah Proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya yang berguna untuk pengambilan keputusan. Indikator penerapan akuntansi sektor publik menurut (Bastian, 2019) yaitu: Transaksi, Analisis buktitransaksi, Pencatatan data transaksi, Pengikhtisaran, pelaporan.

Penerapan Akuntansi Sektor Publik berperan untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah salah satunya yaitu dengan melakukan analisis bukti transaksi, pencatatan data transaksi, pengikhtisaran dan pelaporan. Akuntabilitas kinerja instansi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefisiensikan anggaran tersebut. Penelitian (Putra, 2021) menyatakan Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. (aulia, 2021) menyatakan Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbeda dengan (Salamah, et al., 2021) yang menyatakan Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. (Umar, et al., 2018) menyatakan bahwa akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh.

H1: Penerapan Akuntansi Sektor Publik Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut (Umar, et al., 2018) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa Transparansi adalah Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi laporan keuangan berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas

pengelolaan sumberdaya public (Novianti, et al., 2019) kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. (Shafratunnisa, 2016) Transparansi laporan keuangan adalah keterbukaan dalam memberikan informasi terkait proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran. (Novianti, et al., 2019)) Indikator transparansi laporan keuangan sebagai berikut: Komunikasi publik oleh pemerintah, hak masyarakat terhadap akses informasi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Umar, et al., 2018). Pemerintahan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka terjadi peningkatan terhadap kinerja instansi pemerintah karena semua kegiatan, program, dan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan dipublikasikan kemasyarakat. (Umar, et al., 2018) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi para auditor pada Kantor Inspektorat Aceh. Sedangkan menurut (Novianti, et al., 2019) Transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat. Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat.

H2: Transparansi Laporan Keuangan Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Tempat penelitian pada pemerintah kabupaten pangkajene dan kepulauan khususnya Organisasi Perangkat Daerah yang berbentuk dinas dan badan. Populasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten pangkajene dan kepulauan berjumlah 49 OPD. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sebanyak 12 OPD yang terdiri dari dinas dan badan. Alasan peneliti hanya mengambil 12 OPD sebagai sampel yaitu untuk mempersempit ruang lingkup penelitian dikarenakan keterbatasan waktu, serta jarak OPD antar pulau yang cukup jauh. Dari setiap OPD akan diambil 5 responden dengan kriteria ASN yang bekerja di bagian keuangan dan staf keuangan. sehingga total diperoleh sebanyak 60 responden.

(Sugiyono, 2021 hal. 207) menyatakan bahwa Statistik Inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi linear berganda. Bentuk

persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

A : Konstanta

β_1 -2 : nilai beta dari masing-masing variabel independen

X1 : Penerapan Akuntansi Sektor Publik

X2 : Tansparansi Laporan Keuangan

E : Standar Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Pemerintah yang terdaftar di OPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kuesioner yang disebar peneliti adalah 60 kuesioner. Dari 60 kuesioner hanya terisi sebanyak 51 kusioner, 9 kuesioner tidak kembali dikarenakan belum mendapat disposisi oleh ketua badan pusat statistic. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 49, dan 2 kuesioner gugur dikarenakan tidak lengkap pengisian. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui penyebaran langsung di OPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dengan demikian tingkat pengembalian kuesioner yang diperoleh adalah 81,6%. Dengan identitas responden adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Frekuensi	Presentase (%)
Bendahara	4	6,6%
Kasub Perencanaan	1	1,6%
Kasub Umum	1	1,6%
Kasubag	1	1,6%
Kasub Keuangan	2	3,3%
Kasubid	1	1,6%
Sekretariat	2	3,3%
Staff	31	52%
THL	6	10%
Total Responden	49	81,6%

Sumber : OPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Data diolah (2023)

Suatu instrumen dikatakan valid jika r hitung $>$ r table (0,30) dan reliabel apabila memiliki koefisien kehandalan (*alpha conbach*) sebesar dari 0,60 atau lebih. Berikut hasil uji validitas dan reliabilitas seperti dalam table dibawah ini:

Tabel 2 Hasil Pengujian Validitas

Variabel		r Hitung	r Tabel	Keterangan
Penerapan Akuntansi Sektor Publik	X1.1	0,700	0,30	Valid
	X1.2	0,816	0,30	Valid
	X1.3	0,714	0,30	Valid
	X1.4	0,878	0,30	Valid
	X1.5	0,911	0,30	Valid
Transparansi Laporan Keuangan	X2.1	0,452	0,30	Valid
	X2.2	0,408	0,30	Valid
	X2.3	0,695	0,30	Valid
	X2.4	0,466	0,30	Valid
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Y1	0,680	0,30	Valid
	Y2	0,563	0,30	Valid
	Y3	0,525	0,30	Valid
	Y4	0,453	0,30	Valid
	Y5	0,409	0,30	Valid

Sumber : Data olahan SPSS (2023)

Tabel 3 Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Koofisien Reliabilitas (a)	Nilai Batas Alpa (a)	Keterangan
Penerapan sistem akuntansi sektor publik	0,828	0,60	Reliabel
Transparansi laporan keuangan	0,705	0,60	Reliabel
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0,755	0,60	Reliabel

Sumber : Data olahan SPSS (2023)

Uji normalitas adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, distribusi dari residual (selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya) mengikuti distribusi normal atau tidak. Hal ini penting karena keberhasilan model regresi dalam melakukan prediksi atau estimasi dapat terpengaruh oleh distribusi residual yang tidak normal. Hasil uji normalitas juga dapat memberikan wawasan penting tentang apakah terdapat potensi adanya outlier atau data yang ekstrem dalam distribusi residual. Jika distribusi tidak normal, hal ini dapat mengindikasikan bahwa terdapat potensi adanya anomali dalam data, yang dapat mempengaruhi validitas hasil analisis regresi. Dengan menguji normalitas, peneliti dapat menentukan apakah asumsi tentang distribusi residual terpenuhi, sehingga memastikan keandalan dan validitas hasil dari model regresi yang digunakan, variable dependen dan variable independen atau keduanya memiliki distribusi yang normal atau tidak. Metode yang digunakan ialah *Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test* dengan asumsi jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal.

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		49
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.43968869
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.072
	Negative	-.104
Test Statistic		.104
Asymp.Sig.(2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data olahan SPSS (2023)

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji penerapan akuntansi sektor publik, transparansi laporan keuangan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan bantuan program SPSS versi 26 for windows dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
	B	Std. Error	Beta	
(Constant)	3.425	2.448		1.399
Penerapan Akuntansi Sektor Publik	.352	.164	.327	2.144
Transparansi Laporan Keuangan	.585	.210	.425	2.792

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data olahan SPSS (2023)

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut: $Y=3.425+0.352X_1+0.585X_2+e$. Uji Parsial, yang juga dikenal sebagai Uji T, merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk menilai pengaruh individu dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dalam sebuah model regresi. Secara spesifik, uji ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi sejauh mana masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri mempengaruhi variabel dependen tanpa mempertimbangkan variabel lainnya dalam model. Hasil dari Uji Parsial sangat penting dalam membantu mengidentifikasi kontribusi relatif dari setiap variabel independen terhadap variabel terikat, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami dan mengukur dampak individu dari setiap faktor

dalam hubungan regresi yang diuji. Hasil Uji T dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 6 Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std.Error	Beta		
1	(Constant)	3.425	2.448		1.399	.169
	Penerapan Akuntansi Sektor Publik	.352	.164	.327	2.144	.037
	Transparansi Laporan Keuangan	.585	.210	.425	2.792	.008

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Data olahan SPSS (2023)

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama Nilai $t_{hitung} 2.144 > t_{tabel} 2.0141$ serta nilai signifikannya $0,037 < 0,05$ maka H1 diterima. Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab bila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas. (Salamah, et al., 2021) mengatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah Suatu proses pengindetifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (aulia, 2021) yang mengatakan bahwa Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik sebuah penerapan akuntansi sektor publik akan membuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga ikut meningkat begitu pula sebaliknya.

Hasil uji hipotesis kedua nilai $t_{hitung} 2.792 > t_{tabel} 2.0141$ serta nilai signifikansi $0,008 < 0,05$ maka H2 diterima. Transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa transparansi laporan keuangan masyarakat terbuka dan dapat di akses masyarakat oleh karena itu kita dapat melihat pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat dan hal ini dapat mengurangi terjadinya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Menurut (Umar, et al., 2018) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novianti, et al., 2019) bahwa Transparansi Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hal ini dapat disimpulkan bahwa transparansi yang baik akan mempengaruhi perkembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Artinya akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini berarti bahwa transparansi laporan keuangan masyarakat terbuka dan dapat di akses masyarakat.

Diharapkan pegawai OPD Pemerintah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan khususnya pada bagian pengelolaan keuangan diharapkan dapat mempertahankan sistem akuntansi dalam pembuatan pelaporan keuangan dan dapat transparansi dalam pelaporannya agar masyarakat dapat melihat langsung kinerja pemerintah kedepannya. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi Penerapan sistem akuntansi keuangan dan transparansi terhadap akuntabilitas keuangan di Pemerintah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, agar dapat menyempurnakan penelitian ini lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, oktaviani. 2021. pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada organisasi perangkat daerah (OPD) kota pekanbaru [Laporan]. - pekanbaru : <https://repository.uir.ac.id/10582> , - hal. 1-77.
- Bastian, Indra. 2019. Akuntansi Manajemen Sektor Publik [Buku]. - Tangerang Selatan : Universitas terbuka,
- Humairah, S. 2022. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Makassar.. - Makassar : [s.n.],.
- Mardiasmo. 2021 Akuntansi Sektor Publik [Buku]. - Yogyakarta : Andi.
- Negara, Lembaga Administrasi. 2013 SK Kepala LAN Nomor 9 tahun 2013 // Tentang Petunjuk 'Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lembaga Administrasi Negara ..
- Novianti, ait, Kusumah R. Wedi Rusmawan dan Vabiani Diandra Pepi. 2019 Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah [Jurnal] // Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. - [s.l.] : <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>, - hal. 51-62.
- Pemerintah, Peraturan. 2010 peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah .

- Putra, Pebri Asari. 2021. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengendalian Akuntansi dan Ketaatan Pada peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kuantan Singingi [Jurnal] // Juhanperak. - [s.l.] : <http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/article/view/1737>,. - hal. 474-492.
- Rahmawati, Winda Riva dan Heliana. 2022. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah [Jurnal] // Bandung Conference Series: Accountancy. -. - hal. 51-58.
- Salamah, Nurhani, Sudarmanto Ernadhi dan Herlisnawati Dessy. 2021. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bogor [Jurnal] // JOM.unpak.ac.id. -. - hal. 71-82.
- Shafratunnisa, Fierda. 2016. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholder di SD Islam Binakheir [Laporan]. - Jakarta : <http://repository.uinjkt.ac.id>.
- Sudirman. 2021 <https://makassar.tribunnews.com> [Online]. -. - 24 january 2023. - <https://makassar.tribunnews.com/2021/04/23/pangkep-raih-sakip-predikat-b-kalahkan-barru-enrekang-jeneponto-dan-selayar> .
- Sugiyono. 2021. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D [Buku]. - Bandung : Alfabeta,. - Vol. 3.
- Umar, Zulkifli, Syawalina Cut Fittika dan Khairunnisa. 2018. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh [Jurnal] // Jurnal Kolegial. - Desember. - 2 : Vol. 6. - hal. 136-148.